

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Arab Saudi merupakan negara terbesar di Semenanjung Arab dan jembatan darat yang menghubungkan Afrika dan Eropa. Selain itu, Arab Saudi merupakan negara yang memiliki dua tempat istimewa bagi masyarakat Muslim, yaitu Mekkah dan Madinah. Oleh karenanya, hal tersebut menjadikan wilayah Arab Saudi penting terhadap negara yang mayoritas Islam. Arab Saudi memiliki lokasi geografis yang berbatasan langsung dengan Yordania dan Irak ke utara, Kuwait ke Timur Laut, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab ke timur, Oman ke tenggara, dan Yaman ke selatan (Saudi Arabia Handbook, 2007). Wilayah Arab Saudi dapat dikatakan luas di antara negara-negara Timur Tengah lainnya; populasi Arab Saudi akan terus meningkat seiring dengan kedatangan ekspatriat dari berbagai dunia. Berdasarkan data World Bank di tahun 2019, jumlah populasi Arab Saudi mencapai 34,5 juta (World O Meters, 2019).

Arab Saudi menjadi negara di Timur Tengah yang memiliki potensi besar dengan kapabilitas sumber daya dan keadaannya dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Salah satu sumber daya terbesar di dunia yang dihasilkan oleh Saudi adalah minyak. Arab Saudi menjadi produsen terbesar di dunia yang memasok minyak ke negara-negara lain, hal ini bisa dilihat dari produksi minyak Arab Saudi per harinya bisa mencapai sekitar 12,3 juta barel dan menjadi pemasok kebutuhan minyak dunia sebesar 13,4% di dunia serta sebesar 38,8% di Timur Tengah (BP, 2017). Sebagai negara produksi minyak terbesar di dunia, Saudi mendapatkan banyak keuntungan yang menunjang sektor perekonomiannya yang membuat Arab Saudi bisa bersaing dan mengalami peningkatan di dunia.

Pada tahun 2015, Arab Saudi secara resmi melantik Salman bin Abdul Aziz sebagai Raja Arab Saudi. Hal ini juga diikuti dengan diangkatnya Muhammad bin Salman (MbS), putra kandung Salman, menjadi putra mahkota pada tahun 2017 menggantikan Muhammad bin Nayef yang didukung oleh 31 dari 43 komisi

sukses Saudi. MbS, yang menjabat sebagai putra mahkota memiliki peranan penting setelah raja serta menjadi tokoh sentral dalam pembuatan kebijakan Saudi dengan mulai menerapkan perubahan kebijakan yang ambisius (CRS, 2019).

Muhammad bin Salman lahir pada 31 Agustus 1985; pada 2019 berusia 34 tahun. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud. Ia merupakan putra pertama dari pasangan Raja Salman dan istri ketiganya, Fahdah binti Falah bin Sultan. Pada tahun 2007, MbS memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas King Saud lalu bekerja sebagai konsultan untuk komisi ahli kabinet pemerintahan Arab Saudi. Di tahun 2009, MbS memasuki dunia politik dengan menjadi penasihat khusus Salman saat menjadi Gubernur Provinsi Riyadh. Kemudian, MbS menjadi penasihat pribadi Salman pada tahun 2011 saat Salman diangkat sebagai wakil perdana menteri dan menteri pertahanan kedua. Posisi MbS dalam pemerintahan Arab Saudi berkembang seiring dengan perpindahan posisi ayahnya dalam pemerintahan Arab Saudi (Al-Jazeera, 2017). Peningkatan posisi Muhammad bin Salman semakin terlihat pada tahun 2015 pasca dilantik Raja Salman. Di bulan Januari 2015, MbS dilantik menjadi Menteri Pertahanan Arab Saudi dan ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Pengadilan Kerajaan pada tanggal yang sama. Pada bulan yang sama, Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan Arab Saudi dibentuk dan MbS ditunjuk sebagai ketuanya (Al-Jazeera, 2017). MbS menempati posisi sebagai Wakil Putra Mahkota pada bulan April 2015, berposisi tepat di bawah Muhammad bin Nayef sebagai Putra Mahkota. Di bulan yang sama, MbS diberi kendali atas Saudi Aramco, perusahaan Minyak milik Kerajaan Arab Saudi. Tidak hanya sebagai Wakil Putra Mahkota dan Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan, MbS juga dilantik sebagai Menteri Pertahanan dan Ketua Dewan Urusan Politik dan Keamanan Arab Saudi di tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016, Muhammad bin Salman merilis Visi 2030 sebagai panduan untuk masa depan Arab Saudi. Lalu pada Juni 2017, Muhammad bin Salman diangkat menjadi Putra Mahkota (Al-Jazeera, 2017).

Sistem pemerintahan yang bersifat monarki mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Arab Saudi dan menjadi tantangan dalam mengatasi isu sosial,

ekonomi, budaya, dan politik (Raphaeli, 2003). Walaupun Saudi memiliki pemerintah yang monarki, tidak berarti kebijakan-kebijakan di Arab Saudi seratus persen dipengaruhi dengan besar dan ditentukan oleh seorang Raja. Hak untuk membuat kebijakan luar negeri tidak diserahkan satu-satunya kepada raja, tetapi juga memerlukan peranan menteri-menteri yang berwenang dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Pada *Basic Laws of Governance* (dalam Bahasa Arab dinamakan dengan *للحكم الأساسي النظام*) Arab Saudi pasal 57 (b) dijelaskan bahwasannya deputi perdana menteri dan menteri-menteri di dewan kementerian bertanggung jawab dengan menyatakan solidaritas di hadapan raja untuk menerapkan syariat Islam dan kebijakan negara. Oleh karenanya, di Arab Saudi raja tidak menjadi satu-satunya subjek yang berperan penuh terhadap pembuatan kebijakan luar negeri. Hal ini dapat dilihat pada kasus *Arab Peace Initiative* dalam menghadapi konflik Israel-Palestina tahun 2002. Inisiatif perdamaian itu dilakukan oleh Putra Mahkota, Abdullah bin Abdulaziz. Dalam inisiatif tersebut, Raja Fahd tidak memiliki peran sentral dan peran sentral justru dipegang oleh Abdullah. Kondisi menunjukkan bahwa meskipun Arab Saudi bersifat monarki, tidak semua inisiasi kebijakan luar negeri dilakukan oleh raja (Podeh, 2015).

Hal ini juga terjadi pada MbS yang mulai merancang sebuah kebijakan domestik dan luar negeri sebagai salah satu bentuk perubahan arah Saudi. Salah satu rancangannya adalah membuat kebijakan melalui konsep Visi 2030 yang memiliki poin penting untuk melakukan perubahan dan diversifikasi ekonomi. Tujuan visi ini bagi Saudi adalah untuk meningkatkan potensi-potensi yang bisa diraih oleh Saudi untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor minyak dan gas serta menarget dana sebesar 500 miliar dolar AS (Haryadi, 2018). Visi 2030 menjadi kebijakan yang MbS memiliki peran besar dalam proses pembuatannya serta memiliki tekad yang serius untuk mewujudkan pelaksanaan visi tersebut. Dalam Visi 2030 juga menyebutkan beberapa poin tujuan yang salah satunya adalah mempromosikan budaya dan hiburan, yaitu:

"We will seek to offer a variety of cultural venues – such as libraries, arts and museums – as well as entertainment possibilities to suit tastes and preferences. These projects will also contribute to our economy and will result in the creation of many job opportunities"

Pasca mengusung kebijakan Visi 2030, MbS juga mengenalkan visi ini untuk menjadi bagian dari program identitas nasional Saudi yang berbasis pada nilai dan ajaran Islam. Meskipun visi ini belum memiliki spesifikasi metode bagaimana cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, namun visi ini menjadi langkah awal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. MbS saat diwawancarai oleh salah satu media The Atlantik, ia menyatakan bahwa:

"Saudis don't want to lose their identity, but we want to be part of the global culture. We want to merge our culture with global identity. Without establishing a new social contract between citizen and state, economic rehabilitation would fail."

Terpilihnya MbS sebagai putra mahkota dan perumus aktif Visi 2030 menimbulkan transisi dan proses reformasi Saudi Arabia yang paling signifikan di kawasan Timur Tengah. Beberapa kebijakannya menjadi sebuah bentuk reformasi sosial baru yang membuat Saudi memiliki citra lebih modern dan liberal, contoh kebijakannya adalah pembukaan gedung bioskop, mengizinkan perempuan untuk mengemudi, dan membuat kampanye anti-korupsi. Selain itu, Saudi lebih terbuka dan terlibat aktif secara budaya di ranah internasional dengan membuka kunjungan atau melakukan hubungan diplomasi budaya dengan negara lain (Ali, 2019).

Pada bulan April 2016, Muhammad bin Salman saat menjabat sebagai Wakil Putra Mahkota dan Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan merilis Visi 2030. Visi 2030 merupakan program yang bertujuan untuk membangun kekuatan Arab Saudi sebagai pusat investasi yang berlokasi di jantung dunia Arab dan dunia Islam dengan koneksi geografis yang kuat dengan Eropa, Asia, dan Afrika. Visi 2030 memberikan garis besar 24 tujuan spesifik untuk Kerajaan Arab Saudi yang perlu dicapai dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Visi 2030 kemudian meletakkan 18 komitmen untuk mencapai 24 tujuan ini terutama dalam bidang

energi terbarukan, manufaktur, pendidikan, *e-governance*, hiburan, dan budaya (Vision 2030, 2017).

Salah satu bagian penting dari Visi 2030 adalah program yang dinamakan dengan *The Quality of Life Program 2020*. Salah satu aspek pada program ini adalah mempromosikan kontribusi Arab Saudi di bidang kesenian dan budaya melalui pengangkatan dan pengembangan tujuh bidang kebudayaan, yaitu seni visual, seni penampilan, pembuatan film, sastra, desain, dan peninggalan nasional. Pengembangan ini dilakukan dengan berfokus pada peningkatan kapasitas para pegiat seni dari berbagai tingkat, meningkatkan dan memperbaiki kualitas produksi domestik, dan menambah kehadiran Arab Saudi dalam hal kebudayaan dan kesenian di tingkat internasional. Dalam konteks ini, program bersangkutan berusaha untuk membangun pulau yang kondusif bagi perkembangan seni dan budaya di Jeddah dan 45 sinema, 16 teater, 42 perpustakaan, dan kompleks kesenian di Riyadh pada tahun 2020 untuk mengangkat sektor budaya dan kesenian di Arab Saudi. Arab Saudi menganggarkan untuk program ini hingga sebesar 34,6 miliar dolar AS (Vision 2030, 2017).

Kondisi ini kontradiktif dari kerajaan Saudi yang menganut paham Wahabisme. Selama lebih dari dua abad, Wahabisme menjadi ajaran yang dominan di Saudi dan paham ini menjadi bentuk Islam yang menafsirkan Al-Quran secara literal. Wahabi percaya bahwa semua yang menyimpang dari ajaran Islam akan dinilai sebagai musuh. Pemahaman dari ajaran Wahabi melihat dari perilaku keagamaan secara detail dengan mulai memberikan doktrin kepada anak-anak di bawah umur untuk diajarkan bahwa semua yang dilakukan harus berdasarkan pada ajaran syariah. Paham Wahabi juga adanya pelarangan terhadap permainan atau hiburan, seperti menerbangkan layang-layang oleh anak-anak, larangan untuk membentuk rambut dan menghias wajah. Kegiatan kreativitas dan belajar menjadi terbatas, seperti mendengarkan musik, nyanyian, menonton video, dan bermain diawasi secara ketat oleh otoritas pemerintah (Ungureanu, 2009).

Ajaran-ajaran Saudi ini bertentangan dengan pola kebijakan yang diambil oleh MbS yang mulai membuka diri pada aspek budaya negara lain, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa Saudi mulai mengarah pada sistem yang liberal dengan membuka gedung bioskop yang konsekuensinya adalah film-film dari negara lain diperbolehkan untuk diputar di Saudi, memperbolehkan perempuan mengemudi, tidak melarang perayaan Valentine, hingga mengarah membuka diri pada aspek budaya negara China. Hubungan Saudi dan China mulai mengalami kedekatan sejak tahun 2018, hal ini dapat dilihat dari pembukaan *cultural exhibition* di National Museum, Riyadh (Xuxin, 2018), pembukaan perpustakaan digital Arab-China yang diluncurkan bulan Maret 2018 oleh Liga Arab, dan baru saja di awal tahun 2019, kedua negara saling bertemu untuk membahas aspek budaya (Al-Arabiya, 2019). Pada interview di media Xinhua, Menteri Energi, Industri, dan Mineral Saudi, Khalid bin Abdulaziz Al-Falih menyatakan bahwa investasi dengan China baru saja dimulai, ia juga menyatakan bahwa:

"Our culture is very compatible with the Chinese culture. We have sent hundreds of our students to study in China, and when they came back speaking Chinese, it makes thousands of Saudi people understand how great China is and how wonderful the Chinese people are. We need more of that, There will be great prosperity for both countries." (Westcott, 2019).

Pada tahun 2019, MbS melakukan kunjungan untuk menemui presiden, pejabat tinggi, dan menteri China. Kedua negara tersebut selain menandatangani kerjasama dalam industri maritim, MbS juga mengumumkan bahwa akan ada hubungan kerjasama budaya dengan China melalui pengajaran bahasa Mandarin yang diimplementasikan di sekolah dan universitas Arab Saudi (Saudi Gazette, 2019).

Hubungan Saudi dengan China telah ada sejak lama tetapi dalam bentuk kerjasama ekonomi, militer, dan energi. Contohnya pada tahun 1999, pada saat itu Presiden China, Jiang Zemin mengunjungi Riyadh dengan menghasilkan perjanjian *Strategic Oil Cooperation*. Perjanjian ini menjadi awal mula kesempatan kerjasama kedua negara dalam industri minyak dan gas (Lee dan Shalmon, 2007). Kunjungan kedua dilakukan pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Raja Abdullah dan menghasilkan kerjasama energi serta membahas

perdagangan ekonomi yang lebih luas. Selain itu, Presiden Hu Jintao menyatakan bahwa hubungan bilateral ini akan membuka babak baru kerjasama ekonomi Saudi dengan China (Simfendorfer, 2009). Pada tahun 2009, Hu mengunjungi Saudi untuk saling bertukar pandangan terkait isu internasional dan regional serta menghasilkan pembukaan pabrik semen di Saudi. Kerjasama terus dilakukan hingga pada tahun 2019, MbS mengunjungi China untuk meningkatkan hubungan kerjasama yang strategis dan berdampak jangka panjang (Saudi Gazette, 2019).

Melihat kontradiksi kebijakan yang dibawakan oleh MbS dengan kebijakan yang dianut oleh Saudi sebelumnya merupakan sebuah fenomena yang unik dan menjadi sebuah sejarah baru bagi perkembangan Saudi. Peran penting MbS sebagai penggagas Visi 2030, berimplikasi pada kemunculan kebijakan-kebijakan luar negeri budaya yang salah satunya adalah pendekatan kebijakan budaya kepada China. Hal ini turut membuat MbS menjadi sosok utama yang layak untuk diteliti dari sisi individu dan fenomena ini menarik untuk dianalisis sebagai sebuah objek penelitian serta penting untuk mencari mengapa perubahan tersebut dilakukan oleh Saudi Arabia di masa setelah MbS naik menjadi putra mahkota. Penelitian ditulis untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, berikut ini adalah rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini:

Mengapa Arab Saudi pada periode MbS menjabat sebagai Putra Mahkota meningkatkan hubungan lebih erat dengan China melalui kebijakan luar negeri budaya?

I.3 Tinjauan Pustaka

Secara mendasar, penelitian ini mengkaji mengenai analisis kebijakan luar negeri. Dalam menganalisis kebijakan luar negeri diperlukan untuk memfokuskan pada interaksi antara aktor dengan lingkungannya serta melihat pentingnya dinamika dalam proses pembuatan kebijakan (Beach, 2012). Singer (1961) menjelaskan

bahwa salah satu alat untuk menganalisis kebijakan luar negeri dalam Hubungan Internasional adalah tingkatan analisis atau *level of analysis*, yaitu untuk menentukan suatu fenomena utuh dengan mengaitkannya pada sistem yang melekat sebagai konteks terjadinya fenomena tersebut atau dengan melihat partikularitas dari fenomena tersebut. Tingkat analisis dapat dikerangkakan secara sistematis agar dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam bangunan studi Hubungan Internasional. Menurut Singer, terdapat dua tingkatan analisis yang dapat mengkaji fenomena hubungan internasional, yaitu sistem internasional dan negara. level analisis dalam tingkat sistem internasional lebih menganalisis secara mendalam dan menyeluruh, sedangkan dalam tingkat negara yang menjadi analisis kebijakan luar negeri adalah aktor yang berkain dalam sistem internasional.

Pernyataan terkait level analisis Singer berbeda dengan tingkat analisis yang dibawakan oleh Waltz (1954 dalam Ray, 2001), ia lebih menyatakan bahwa tingkatan analisis merupakan berbagai faktor yang dipandang dapat mempengaruhi atau menyebabkan terjadi tidaknya suatu fenomena hubungan internasional. Waltz memosisikan perpaduan diantara sistem internasional, negara, dan individu sebagai sebab terjadinya fenomena sebagai sebuah penjelasan yang memadukan diantara ketiganya. Sedangkan Singer memosisikan sistem internasional dan negara memiliki logikanya masing-masing tanpa harus mengintegrasikan masing-masing tingkatan analisis menjadi penjelasan yang padu.

Tingkat analisis dalam kajian hubungan internasional dapat digunakan sebagai alat analisis kebijakan luar negeri suatu negara. Terdapat beberapa jenis tingkat analisis yang memiliki fokus yang berbeda-beda disetiap penggunaannya (Breuning, 2007). Tingkat analisis pertama adalah individu yang merupakan tingkatan dengan melihat dari sisi tokoh yang dinilai berpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, seperti pemimpin suatu negara yang dapat dilihat dari karakteristiknya yang mencerminkan kepentingan negara (Neack, 2008). Tingkat analisis kedua adalah kelompok yang merupakan

pengambilan kebijakan luar negeri berasal dari aktor yang dekat dengan pemimpin, seperti parlemen, penasihat, kabinet, dan partai politik. Tingkat analisis ketiga adalah media dan opini publik yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri dilihat dari pengaruh publik dan media karena mewakili asumsi dari berbagai pihak untuk bisa memberikan kontrol pada peran pemerintah. Media sebagai wadah jurnalistik yang berperan aktif melalui aktivitas media untuk menjaga kestabilan negara melalui pengaruhnya dalam perumusan kebijakan luar negeri. Tingkat analisis yang keempat adalah identitas yang meninjau dari sudut pandang identitas suatu negara. Tingkat analisis kelima adalah politik domestik yang melihat pengaruh komponen-komponen yang ada didalam suatu negara tersebut dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri. Tingkat analisis keenam adalah sistem internasional yang melihat pengaruh pengambilan kebijakan luar negeri secara makro dari sisi struktur internasional yang sedang berlaku.

Setelah mengenali bagaimana kebijakan luar negeri itu diteliti, penting kemudian untuk mengulas sejauh mana penelitian-penelitian terkait kebijakan luar negeri Saudi Arabia terhadap China. Penelitian pertama adalah tulisan dari Makio Yamada (2015) yang berjudul *Saudi Arabia's Look-East Diplomacy: Ten Years On* memaparkan kebijakan luar negeri Saudi yang melakukan hubungan bilateral ke negara Asia, seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan India dengan tujuan mengembangkan sektor ekonomi khususnya kerjasama minyak dan energi terbarukan. Kebijakan Saudi yang mulai mengarah ke Asia juga ingin membuka pasar minyak hingga ekspor sebesar 68% untuk Asia karena ekspor di Eropa telah menurun hanya menjadi 10%. Sedangkan Saudi telah membuka pasar minyak dengan China hingga mencapai 1,1 juta bpd atau sebesar 14% dan akan terus melakukan kerjasama dengan China untuk mendorong pertumbuhan permintaan minyak ditahun mendatang. Selain itu, Saudi memiliki tujuan untuk melakukan diversifikasi industri agar bisa transfer teknologi, sehingga tidak hanya bergantung pada Amerika Serikat saja. Yamada dalam tulisannya menganalisis kebijakan luar negeri Saudi dengan menggunakan level analisis *nation state* yang

melihat dari sisi Saudi sebagai negara serta kepentingan-kepentingan apa yang diperoleh oleh Saudi dari kerjasama bilateral tersebut (Yamada, 2015).

Hal ini tidak jauh berbeda dengan tulisan Patrick (2016 dalam Nonneman, 2017) yang menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri Saudi yang membuka hubungan dengan China adalah atas dasar memenuhi kepentingan ekonomi serta menguasai posisi pasar yang ada di kawasan Asia Timur. Selain itu Patrick juga menganalisisnya dalam sisi level analisis *nation state*, yaitu juga melihat dari kepentingan apa saja yang didapat oleh Saudi. Setelah itu, penelitian dari Cerioli (2019) yang berjudul *Saudi Arabia's National Roles Conceptions After the Arab Uprising* menjelaskan mengenai bagaimana kebijakan luar negeri Saudi pasca Arab Spring. Salah satunya ada perkembangan hubungan dengan China saat putra mahkota MbS menjabat. Hubungan kedua negara tersebut juga ada dalam pertemuan G-20, MbS berhasil membawa China menjadi negara penting untuk menjalankan Visi Ekonomi 2030 dengan menandatangani lebih dari 15 perjanjian terkait ekonomi dan budaya dengan Beijing. Selain itu, China menjadi sumber kerjasama militer dengan Saudi, hingga China menjadi penjual senjata alternatif bagi Saudi selain dari Amerika. Hubungan militerisasi ini menjadi tren yang lebih besar bagi pemerintah Saudi serta akan berpengaruh dalam faktor domestik dan identitas Saudi. Cerioli (2019) juga melihat kebijakan luar negeri Saudi menggunakan level analisis *nation state* dengan melihat hubungan kepentingan Saudi-China dalam bidang militerisasi dan ekonomi.

Sedangkan penelitian dari Sean Foley (2017) yang berjudul *When Oil Is Not Enough: Sino-Saudi Relations and Vision 2030* menjelaskan hubungan Saudi dengan China secara deskriptif kerjasama ekonomi maupun budaya. Namun, dalam penelitian ini tidak mencari mengapa kerjasama budaya dilakukan oleh Saudi dengan China. Pernyataan Foley, menggambarkan aspek baru dalam hubungan kebijakan luar negeri Saudi-China melalui aspek kultur yang selama 15 tahun lamanya, hubungan kedua negara hanya berfokus pada aspek perdagangan energi dan keamanan. Foley (2017) juga memaparkan hubungan Saudi-China secara kultur yang memiliki bayangan rencana untuk membuka industri budaya

dan hiburan. Meskipun bioskop masih dilarang karena dianggap tidak sesuai dengan norma agama dan cenderung masih konservatif tetapi masih ada suatu dinamika gerakan artistik yang mulai muncul dan menjadi pokok bahasan yang kontroversial dalam masyarakat Saudi.

Selanjutnya adalah penelitian dari Feras Klenk (2018) dalam tulisannya yang berjudul *Attempting to Consolidate Power: Analyzing Muhammad bin Salman's Policies in Saudi Arabia*. Klenk menjelaskan melalui level analisis individu, yaitu melihat kebijakan luar negeri Saudi dari sisi kepemimpinan putra mahkota MbS. Tulisan ini tidak secara spesifik menjelaskan mengenai hubungan Saudi dengan China, namun menjelaskan secara umum kebijakan luar negeri Saudi di kawasan Timur Tengah. Selain itu, tulisan ini juga menggambarkan secara deskriptif apa saja peran-peran MbS tetapi tidak menjelaskan secara rinci mengapa MbS berperan dalam kebijakan luar negeri.

Berdasarkan ulasan diatas dapat dilihat bahwa kajian-kajian mengenai kebijakan luar negeri Saudi-China hanya sebatas ekonomi, keamanan, dan energi. Ulasan dalam penelitian tersebut lebih banyak menggunakan level analisis *nation state* dibandingkan dengan level analisis individu. Hingga saat ini, belum terlihat penelitian-penelitian yang menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri dalam aspek budaya Saudi-China dengan menggunakan level analisis individu atau spesifiknya dari sudut pandang putra mahkota MbS.

Dalam menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara dari sisi individu tidak hanya dilakukan oleh pemimpin utama. Namun, juga bisa diterapkan pada sosok-sosok lain yang dinilai penting dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri, seperti menteri atau pangeran. Smith (2012) dalam tulisannya yang berjudul *Personality in Foreign Policy Decision-Making* mengulas mengenai pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Israel pada konflik Arab-Israel dengan menggunakan analisis level individu Ariel Sharon sebagai Menteri Pertahanan selama Perang Lebanon tahun 1982. Sebagai menteri, Ariel Sharon memiliki peran penting yang dikenal untuk mengkonsultasikan kepada kelompok dan sistem birokrasi

pemerintah. Analisis yang dilakukan adalah dengan melihat bagaimana sikap agresif dari Ariel Sharon menjadi sebuah kepribadian yang bisa mempengaruhinya untuk menentukan keputusan kebijakan. Melalui tulisan ini, menunjukkan bahwa analisis level individu tidak hanya dilihat dari pemimpin eksekutif utama yang mampu mempengaruhi arah kebijakan luar negeri suatu negara.

Oleh karenanya, peneliti memilih untuk menggunakan level analisis individu dari sudut pandang MbS sebagai putra mahkota untuk mengulas lebih lanjut mengenai kebijakan luar negeri secara budaya antara hubungan Saudi-China. Peneliti memilih level analisis individu untuk menjadi alat analisis kebijakan luar negeri Saudi-China dalam aspek budaya karena hubungan kerjasama Saudi-China secara kultur meningkat sejak kepemimpinan putra mahkota MbS yang selama 15 tahun hubungan kedua negara tersebut berkuat dalam aspek ekonomi, militer, dan energi.

I.4 Kerangka Pemikiran

I.4.1 *Leadership Style* Margaret Hermann (1999)

Pemimpin politik dalam sistem internasional akan menghadapi kondisi: (1) bagaimana mempertahankan dan mengontrol kendali atas kebijakan luar negeri walaupun masih mendelegasikan wewenangnya pada pihak lain dan (2) bagaimana membentuk agenda kebijakan ketika situasi sedang terbentuk dan permasalahan serta peluang sedang dipersepsikan dan dibentuk oleh pihak lain dalam sistem politik. *Leadership style* berpengaruh dalam bagaimana seorang pemimpin menghadapi dua kondisi itu dan menjadi cara-cara seorang pemimpin akan berinteraksi dengan kelompok politiknya, baik penasehat, konstituen, dan lain sebagainya serta akan menyusun sebuah interaksi tersebut melalui norma, aturan, dan prinsip yang mereka gunakan. *Leadership style* dapat ditentukan dengan menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana seorang pemimpin beraksi dalam menghadapi kendala politik di lingkungannya, apakah akan menghadapi atau menentang, (2) seberapa terbuka pemimpin untuk menerima informasi,

apakah menanggapi dengan selektif, terbuka atau tertutup, (3) apa alasan para pemimpin untuk menempatkan posisinya, apakah didorong dari dalam diri atau dibentuk dari konstituen yang ada. Tiga pertanyaan tersebut akan menghasilkan 3 spektrum biner yang masing-masingnya menghasilkan 2 variabel. Kombinasi antara 6 variabel dari masing-masing 3 spektrum ini akan menghasilkan 8 posisi unik yang menunjukkan *leadership style* dari seorang pemimpin (Herman, 1999).

Spektrum pertama adalah bagaimana seorang pemimpin dalam merespon halangan, apakah seorang pemimpin menantang halangan atau cenderung mengikuti halangan. Spektrum kedua adalah keterbukaan seorang pemimpin dalam menanggapi informasi, apakah pemimpin cenderung tertutup atau membuka diri. Spektrum ketiga adalah motivasi pemimpin yang dilihat dari fokus untuk menyelesaikan permasalahan atau untuk menjalin hubungan baik dengan konstituen atau pihak lainnya. Kombinasi ketiganya dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Pemetaan *Leadership Style*

Gaya Kepemimpinan	Respons terhadap Halangan		Keterbukaan terhadap Informasi		Motivasi dalam Jabatan	
	Menantang Halangan	Menyesuaikan Diri	Terbuka terhadap Informasi	Tertutup dari Informasi	Fokus Permasalahan	Fokus Hubungan
<i>Expansionistic</i> (Fokus pada memperluas kekuatan dan pengaruh seseorang)	v	x	x	v	v	x
<i>Evangelistic</i> (Fokus pada mempengaruhi orang lain untuk menerima pesan seseorang dan bergabung dengan satu alasan)	v	x	x	v	x	v
<i>Incremental</i> (Fokus pada mempertahankan manuver dan fleksibilitas seseorang dengan menghindari)	v	x	v	x	v	x
<i>Charismatic</i> (Fokus pada mencapai agenda seseorang dengan melibatkan orang lain dalam proses dan mempengaruhi mereka untuk bertindak)	v	x	v	x	x	v

<p><i>Directive</i> (Fokus pada kebijakan arahan pribadi yang konsisten dengan pandangan seseorang saat masih bekerja dalam norma dan aturan posisi seseorang)</p>	X	V	X	V	V	X
<p><i>Consultative</i> (Fokus pada pengawasan yang orang lain dukung, atau tidak secara aktif menentang, yang ingin dilakukan seseorang dalam situasi tertentu)</p>	X	V	X	V	X	V
<p><i>Reactive</i> (Fokus pada penilaian apa yang mungkin dalam situasi saat ini mengingat sifat masalah dan mempertimbangkan konstituensi penting apa yang akan memungkinkan)</p>	X	V	V	X	V	X
<p><i>Accommodative</i> (Fokus pada merekonsiliasi perbedaan dan membangun konsensus,</p>	X	V	V	X	X	V

memberdayakan orang lain dan berbagi akuntabilitas dalam proses tersebut)						
---	--	--	--	--	--	--

Sumber: Hermann, 1999

I.4.2 Trait Analysis Margaret Hermann (1999)

Trait analysis diperlukan untuk menentukan posisi pemimpin dalam masing-masing spektrum di atas. *Trait analysis* dilakukan dengan menganalisis 7 kepribadian:

(1) keyakinan seorang pemimpin dalam mempengaruhi atau mengendalikan situasi, (2) kebutuhan akan kekuasaan dan pengaruh, (3) kompleksitas konseptual (memiliki kemampuan untuk membedakan berbagai hal dan orang-orang di lingkungan), (4) kepercayaan diri, (5) kecenderungan untuk berfokus pada penyelesaian masalah dan mencapai sesuatu dibandingkan dengan pemeliharaan kelompok dan berurusan dengan ide-ide dan sensitivitas orang lain, (6) ketidakpercayaan pada pihak lain, dan (7) intensitas pemimpin lebih mengarah pada kelompok tertentu atau *ingroup bias* (Herman, 1999).

Untuk menentukan spektrum pertama, dilihat dari *trait analysis* pertama dan kedua, yaitu (1) keyakinan menguasai situasi dan (2) kebutuhan terhadap kekuasaan akan menentukan apakah mereka akan menantang halangan atau menyesuaikan diri terhadap halangan yang mereka persepsikan ada disekitar mereka. Hubungan keduanya dijelaskan di dalam tabel 2:

Tabel 1.2. Respon Terhadap Halangan

Respon terhadap Halangan	Keyakinan Pemimpin Menguasai Situasi		Kebutuhan Pemimpin akan Kekuasaan	
	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah
Menyesuaikan diri: kompromi dan pentingnya pembangunan konsensus	x	v	x	v
Menantang halangan: langsung dan terbuka dalam menggunakan kekuatan; kurang bisa membaca bagaimana memanipulasi orang dan mengatur di belakang layar untuk mendapatkan pengaruh yang diinginkan.	v	x	x	v
Menantang halangan: tetapi lebih nyaman melakukannya secara tidak langsung - di belakang layar; pandai menjadi "kekuatan di belakang takhta" tetapi kurang bertanggung jawab	x	v	v	x

atas hasilnya.				
Menantang halangan: terampil dalam pengaruh langsung dan tidak langsung; tahu apa yang mereka senangi dan bertanggung jawab untuk melihatnya terjadi	v	x	v	x

Sumber: Hermann, 1999

Untuk menentukan spektrum kedua, dilihat dari *trait analysis* ketiga dan keempat, yaitu (3) kompleksitas konseptual (memiliki kemampuan untuk membedakan berbagai hal dan orang-orang di lingkungan) dan (4) kepercayaan diri. Kedua hubungan ini akan menentukan apakah pemimpin memiliki keterbukaan atau tertutup dalam informasi informasi seorang pemimpin. Hubungan ini akan dijelaskan melalui tabel 3:

Tabel 1.3. Cara Untuk Menentukan Keterbukaan terhadap Informasi

Skor pada Kompleksitas Konseptual & Percaya Diri	Keterbukaan terhadap Informasi Kontekstual
Kompleksitas Konseptual > Percaya Diri	Terbuka
Percaya Diri > Kompleksitas Konseptual	Tertutup
Kompleksitas Konseptual dan Percaya Diri Tinggi	Terbuka
Kompleksitas Konseptual dan Percaya Diri Rendah	Tertutup

Sumber: Hermann, 1999

Untuk menentukan spektrum ketiga, adalah dengan melihatnya melalui *trait analysis* yang kelima, keenam, dan ketujuh yaitu, (5) kecenderungan untuk berfokus pada penyelesaian masalah dan mencapai sesuatu dibandingkan dengan

pemeliharaan kelompok dan berurusan dengan ide-ide dan sensitivitas orang lain akan ditentukan melalui analisis tabel 4 dan (6) ketidakpercayaan pada pihak lain atau kecurigaan terhadap orang lain serta (7) intensitas di mana seseorang lebih mengarah pada kelompok tertentu atau *ingroup bias* akan ditentukan melalui tabel 5. Kedua tabel tersebut yang akan menentukan spektrum ketiga bahwa apakah pemimpin fokus pada permasalahan atau fokus pada hubungan

Tabel 1.4. Cara Untuk Menilai Motivasi untuk Mencari Jabatan

Skor pada Fokus Tugas	Motivasi untuk Mencari Jabatan
Tinggi	Fokus Permasalahan
Sedang	Fokus keduanya – tergantung pada konteks
Rendah	Fokus Hubungan

Sumber: Hermann, 1999

Tabel 1.5. Orientasi dalam Menghadapi Lingkungan

Orientasi dalam Menghadapi Lingkungan	Bias Kelompok		Ketidakpercayaan pada Pihak Lain	
	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah
Fokus pada mengambil keuntungan dari peluang dan membangun hubungan	x	v	x	v
Fokus adalah mengambil keuntungan dari peluang dan membangun hubungan sambil tetap waspada	x	v	v	x
Fokus ada pada penanganan ancaman dan penyelesaian masalah meskipun	v	x	x	v

beberapa situasi tampaknya menawarkan peluang				
Fokusnya adalah menghilangkan potensi ancaman dan masalah	v	x	v	x

Sumber: Hermann, 1999

Dalam menganalisis sifat dan karakteristik dari pemimpin negara melalui *trait analysis*, yang dapat dilakukan adalah dengan mengamati seorang pemimpin dalam menggunakan kata-kata atau frasa tertentu. Kondisi ini juga dilihat berdasarkan analisis konten melalui hasil wawancara, pidato, menanggapi permasalahan, dan lain sebagainya (Herman, 1999).

I.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis menyusun hipotesis sebagai berikut ini. Arab Saudi pada periode MbS meningkatkan aspek budaya dalam kebijakan luar negerinya terhadap China dipengaruhi oleh *leadership style* MbS yang *expansionistic*, yaitu gaya kepemimpinan yang berfokus dalam memperluas *power* dan *influence* yang dimiliki oleh aktor yang diwakilinya. Fokus dalam *leadership style* MbS inilah yang mempengaruhi kemunculan kebijakan luar negeri budaya Arab Saudi terhadap China.

I.6 Metodologi Penelitian

I.6.1 Definisi dan Operasionalisasi Konsep

I.6.1.1 Kebijakan Luar Negeri Budaya

Kebijakan luar negeri ada dalam berbagai bidang yang salah satunya adalah kultur. Tyler dalam Majie (2002) mendefinisikan kultur sebagai sesuatu yang kompleks serta didalamnya terkandung pengetahuan, seni, moral, hukum, adat, kepercayaan, dan kemampuan yang diperoleh dari individu sebagai bagian dari

kelompok suatu masyarakat. Reimann (2003) menyatakan bahwa kebijakan kultur luar negeri sebagai sarana komunikasi antar budaya melalui diplomasi internasional. Unsur dari kebijakan kultur tersebut terkait dengan komunikasi budaya lintas batas, dilakukan oleh negara, aktor utama lainnya adalah pihak yang memiliki kemampuan kultur, dan penonton dalam kebijakan kultur luar negeri dari negara hanya sebagian kecil yang mengatur. Oleh karenanya, kebijakan kultur akan berpengaruh pada hubungan politik dan ekonomi suatu negara tergantung pada tingkat kepentingan dan kekuatannya. Ketika satu negara memiliki kecocokan akan lebih melakukan komunikasi kultur dengan baik dan ketika hanya cocok di beberapa sektor akan lebih sulit. Hubungan kultur dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil yang juga berhubungan pada adanya kepentingan beberapa ekonomi tertentu tetapi komunikasi antar budaya tetap menjadi kebijakan kultur luar negeri yang penting.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kebijakan luar negeri budaya di antara lain adalah pertukaran budaya, pengajaran bahasa asing, mengadakan pameran kebudayaan, membuka perpustakaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan pengetahuan, seni, moral, hukum, adat, dan kepercayaan.

I.6.1.2 Power

Power adalah salah satu konsep yang banyak dimaknai secara berbeda dan banyak dikembangkan secara luas. Secara mendasar, konsep *power* dan *influence* banyak disamakan karena keduanya berkaitan dengan apa yang dikatakan Dahl (1957 dalam Lukes, 2015) bahwa *power* yang mencakup *influence* adalah kemampuan suatu pihak untuk membuat pihak lain melakukan sesuatu yang secara normal tidak akan dilakukannya. Dalam perkembangannya, beberapa *scholars* menyatakan perlu adanya pemisahan antara *power* dan *influence* sebagai dua konsep yang berbeda dan inilah yang ditempuh oleh peneliti di sini. *Power* dimaknai sebagai suatu kemampuan dan kapasitas yang bisa diaktifkan atau tidak (Lukes, 2015). Pengertian ini lebih cocok dengan *hard power* yang didefinisikan oleh Nye (1990), yaitu kemampuan suatu pihak mencapai tujuannya melalui

tindakan-tindakan koersif atau ancaman; menggunakan *carrot-and-stick*. Dalam tradisi keilmuan Hubungan Internasional, *hard power* diukur dengan berbagai kriteria seperti besaran populasi, luas wilayah, kondisi geografi, sumber daya alam, kekuatan militer, dan kekuatan ekonomi.

I.6.1.3 Influence

Influence atau pengaruh sebagaimana disebutkan di atas seringkali disamakan atau dijadikan bagian dari *power*. Kedua konsep memang memiliki banyak irisan, namun keduanya merupakan hal yang berbeda secara mendasar. *Influence* didefinisikan sebagai hubungan antara dua pihak yang keinginan, preferensi, atau kehendak suatu pihak memengaruhi tindakan dan dorongan untuk bertindak pihak lain sejalan dengan keinginan, preferensi, atau kehendak pihak pertama (Dahl dan Stinebrickner, 2003 dalam Lukes, 2015). Oleh karena itu, *influence* lebih dekat dengan konsep *soft power* yang digambarkan oleh Nye (1990), yaitu kemampuan aktor untuk membentuk preferensi pihak lain, tanpa menggunakan pemaksaan dan *force*, melainkan melalui sumber daya *intangible* seperti kepribadian yang menarik, kultur, nilai-nilai politik, lembaga, dan kebijakan yang dinilai memiliki keunggulan dari sisi moral dan etika.

I.6.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatif dengan menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu kumpulan variabel dependen dengan kumpulan variabel independen melalui pengujian hipotesis. Dalam kasus ini adalah menjelaskan hubungan sebab akibat antara hasil *trait analysis* dan *leadership style* yang dimiliki oleh MbS dengan pengaruhnya dalam menghasilkan aspek budaya kebijakan luar negeri Arab Saudi kepada China.

I.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan ditempuh dengan cara mengumpulkan data-dara sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, artikel dalam jurnal ilmiah, makalah, berita, hasil

wawancara, dan pidato. Hasil teks wawancara dan pidato yang telah dikumpulkan untuk penelitian ini berjumlah tujuh¹ yang berasal dari Bahasa Arab terjemahan dan Bahasa Inggris asli yang disertakan pada lampiran.

I.6.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis interpretatif terhadap data-data yang diperoleh dari proses pengumpulan data. Analisis dilakukan dengan analisis konten untuk menjawab rumusan masalah dan menjawab hipotesis. Selain itu, analisis juga digunakan untuk mencari informasi dan kebenaran dari perubahan kebijakan luar negeri Saudi dalam bidang budaya terhadap China dari sisi Mbs.

Analisis konten dilakukan menggunakan metode *leadership trait analysis* yang dirumuskan oleh Hermann (1999) dan bersifat kuantitatif. Secara garis besar, *leadership trait analysis* dilakukan dengan mencari kata-kata kunci yang mengindikasikan tinggi rendahnya tingkat 7 variabel gaya kepemimpinan, yaitu keyakinan pemimpin dalam menguasai situasi, kebutuhan akan kekuasaan, kompleksitas konseptual, kepercayaan diri, *task focus*, bias kelompok, dan ketidakpercayaan pada pihak lain. Cara perhitungan diringkas dalam tabel di bawah ini.

¹ Terdapat wawancara MbS menggunakan Bahasa Inggris, bersama media TIME pada bulan Maret tahun 2018 di New York City's Plaza Hotel. Terdapat enam pidato MbS terjemahan Bahasa Inggris dari Bahasa Arab, yaitu (1) MbS mengunjungi China pada bulan Februari 2019, (2) MbS bertemu dengan Xi Jinping bulan Februari 2019 di Great Hall of the People, Beijing, (3) MbS membuka pertemuan perdana menteri pertahanan Koalisi Militer Islam di Riyadh pada November 2017, (4) MbS berpidato saat sesi penutupan KTT G20 ke-14 di Osaka, Jepang pada Juni 2019, (5) ujaran MbS dalam Visi 2030, dan (6) pernyataan MbS bersama media The Atlantic pada bulan April 2018

Tabel 1.6. Pengukuran Masing-Masing Variabel Gaya Kepemimpinan

Variabel	Cara Perhitungan	Keterangan	
		1	2
Keyakinan Pemimpin Menguasai Situasi	$\frac{A_1}{A_2}$	Kata kerja yang disematkan pada diri pemimpin, lembaga, kelompok, atau negara yang diwakili pemimpin dan menunjukkan tindakan	Seluruh kata kerja yang disematkan pada diri pemimpin, lembaga, kelompok, atau negara yang diwakili pemimpin
Kebutuhan akan Kekuasaan	$\frac{B_1}{B_2}$	Kata-kata kerja yang mengindikasikan 6 hal berikut: (1) mengusulkan atau mengupayakan tindakan yang kuat atau tegas seperti penyerangan, ancaman verbal, tuduhan, atau teguran, (2) memberikan nasihat atau bantuan ketika tidak diminta, (3) mengupayakan untuk meregulasi perilaku seseorang atau kelompok lain,	Seluruh kata kerja yang disematkan pada diri pemimpin, lembaga, kelompok, atau negara yang diwakili pemimpin

		(4) mencoba meyakinkan pihak lain baik untuk mencapai kesepakatan maupun menghindari kesepakatan, (5) berupaya untuk membuat kesan baik atau memperoleh ketenaran dengan tindakan, dan (6) peduli dengan reputasi dan posisinya.	
Kompleksitas Konseptual	$\frac{C_1}{C_2}$	Kata-kata yang menunjukkan kompleksitas konseptual tinggi, seperti <i>approximately, trend, possibility, for example</i> , dan lain-lain yang menunjukkan kemungkinan dan pengkategorian non-biner.	Keseluruhan kata-kata yang menunjukkan kompleksitas konseptual tinggi dan kompleksitas konseptual rendah (seperti <i>absolutely, without a doubt, certainly</i> , dan <i>irreversible</i> yang menunjukkan kepastian serta pengkategorian biner.)
Kepercayaan Diri	$\frac{D_1}{D_2}$	Kata-kata ganti pihak pertama	Keseluruhan kata-kata ganti

		seperti “my”, “myself”, “I”, “me”, dan “mine” yang diikuti dengan kata yang menunjukkan seorang pemimpin memulai suatu tindakan, perlu dilihat sebagai otoritas dalam suatu masalah, atau menerima respons positif dari pihak atau kelompok lain.	pihak pertama.
<i>Task Focus</i>	$\frac{E_1}{E_2}$	Kata-kata yang berorientasi pada penyelesaian tugas seperti <i>accomplishment, achievement, plan, position, proposal, recommendation, tactic</i> , dan sebagainya.	Jumlah kata-kata yang berorientasi pada penyelesaian tugas dan pembangunan kelompok (seperti <i>appreciation, amnesty, collaboration, disappointment, forgiveness, harm, liberation, suffering</i> , dan sebagainya.)

Bias Kelompok	$\frac{F_1}{F_2}$	Kata-kata yang dilekatkan pada kelompok yang diwakili pemimpin dan bersifat disukai seperti <i>great, peace-loving, progressive, successful, prosperous;</i> menunjukkan kekuatan seperti <i>powerful, capable, made great advances, has boundless resources;</i> atau mengindikasikan kebutuhan untuk menjaga identitas dan harga diri kelompok seperti <i>need to defend firmly our borders</i> atau <i>must maintain our own interpretation.</i>	Keseluruhan kata-kata yang dilekatkan pada kelompok yang diwakili kelompok.
Ketidakpercayaan pada Pihak Lain	$\frac{G_1}{G_2}$	Kata benda atau frasa yang merujuk pada pihak selain dirinya dan selain kelompok yang diwakili	Keseluruhan kata yang merujuk pada pihak selain dirinya dan selain kelompok yang diwakili

		pemimpin dan menunjukkan keraguan, kegelisahan, kewaspadaan, bahaya, dan sejenisnya.	pemimpin.
--	--	--	-----------

Sumber: Hermann (1999)

Kemudian setelah melakukan pengukuran berdasarkan tabel di atas, nilai hasil pengukuran masing-masing variabel tersebut dicocokkan dengan kategori yang disusun oleh Hermann. Kategori ini dibuat oleh Hermann berdasarkan hasil pengukurannya terhadap 122 pemimpin politik dari berbagai negara dunia. Kategori ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.7. Kategori Hasil Pengukuran Gaya Kepemimpinan Pemimpin Politik

Variabel	Rendah	Rata-Rata	Tinggi
Keyakinan Pemimpin Menguasai Situasi	<0,30	0,45	>0,57
Kebutuhan akan Kekuasaan	<0,38	0,50	>0,62
Kompleksitas Konseptual	<0,32	0,45	>0,58
Kepercayaan Diri	<0,34	0,57	>0,80
<i>Task Focus</i>	<0,48	0,62	>0,76
Bias Kelompok	<0,34	0,43	>0,53
Ketidakpercayaan pada Pihak Lain	<0,20	0,38	>0,56

Sumber: Hermann (1999)

Berikutnya, letak hasil nilai Muhammad bin Salman dalam 7 variabel ini disesuaikan dengan tabel-tabel sebelumnya untuk menentukan gaya kepemimpinan Muhammad bin Salman.

I.6.5 Jangkauan Penelitian

Pada pembahasan penelitian ini, penulis menyoroti upaya Kebijakan Luar Negeri Budaya Arab Saudi terhadap China yang dilakukan sejak periode Mbs menjabat sebagai putra mahkota Arab Saudi pada tahun 2017 hingga 2019.

I.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Bab I membahas mengenai pendahuluan penelitian yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang terbentuk, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metodologi penelitian. Bab II membahas mengenai kebijakan luar negeri budaya antara Arab Saudi dengan China. Berikutnya, pada Bab III membahas mengenai analisis terhadap *leadership style* MbS. Pada Bab IV membahas mengenai analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan dari Bab II dan Bab III dengan mengaitkannya pada *power* dan *influence*. Bab V berisi mengenai pengujian hipotesis dan kesimpulan dari penelitian.